

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang menerapkan bentuk pemerintahan demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara demokrasi ada ditangan rakyat, dan rakyat memiliki hak, suara, dan kesempatan yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah<sup>1</sup>. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung, maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selain daripada itu demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Sebagai salah satu syarat berjalannya sistem demokrasi dalam suatu Negara yaitu dengan adanya penyelenggaraan pemilu yang terbuka, bebas, dan adil. Sesuai dengan ungkapan tersebut dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia rakyat dapat memilih pemimpin/pemerintah secara langsung dan terbuka. Hal ini bertujuan

---

<sup>1</sup> Tohir Bawazir. *Jalan Tengah Demokrasi: antara fundamentalisme dan sekulerisme* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar tahun 2015) hal 78-79

agar kelak dapat merubah arah dan kualitas hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan.

Pemilu di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1955. Pemilu merupakan bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Karena pada saat itulah rakyat menjadi bagian penting yang sangat menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung kepada sosok pemimpin yang diinginkannya. Dengan mendatangi tempat pemungutan suara, menggunakan hak pilihnya, dan memutuskan pilihan, masyarakat berpartisipasi dalam menentukan bangunan politik dan pemerintahan di wilayah tersebut dalam 5 tahun ke depan sebagai bagian dari pembangunan politik.

Pesta demokrasi (pemilu) merupakan ruang publik yang memungkinkan setiap individu berperan aktif dalam menggunakan haknya sebagai warga Negara. Sejalan dengan hal tersebut bahwa perhelatan pesta demokrasi tentunya bukan hanya milik orangtua atau masyarakat yang cakap politik saja, para remaja dan kaum muda pun yang sudah menginjak usia 17 tahun dan atau yang sudah menikah termasuk dalam kategori warga Negara yang sudah bisa mengikuti

pemilu. Mereka adalah kelompok yang baru menggunakan hak pilihnya.

Untuk terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis, pemerintah harus membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat terutama partisipasi politiknya. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting didalam demokrasi karena segala keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negaranya, maka masyarakat berhak ikut andil dalam menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik<sup>2</sup>.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor terpenting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Negara demokrasi umumnya menganggap bahwa lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi itu lebih baik daripada sedikit masyarakat yang berpartisipasi. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan politik demokrasi merupakan hak warga negara, tetapi dalam kenyataan, presentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda-beda. Karena tidak semua warga Negara ikut serta dalam proses politik ada

---

<sup>2</sup> A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2007) hal 285

yang ikut berpartisipasi, ada yang kurang berpartisipasi. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)<sup>3</sup>.

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama yaitu pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih pemimpin atau partai berdasarkan penelitian dan analisis pribadi secara mendalam. Kategori kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Kategori ketiga adalah pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih dan atau masuk dalam kategori pemilih dalam pemilu<sup>4</sup>

Menurut UU no 7 tahun 2017, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Ini berarti status pemilih dalam ranah pemilihan umum (pemilu) melibatkan para pemuda semenjak ia beranjak dewasa. Dalam hal ini para pemilih yang berusia dibawah 21 tahun dikategorikan kedalam kalangan pemilih remaja yang

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. GRASINDO 1992) Hal 144

<sup>4</sup> Isnaeni Lailatul Izza, "Pengaruh Money Politics terhadap Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015", Desember 2016

menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pemula. Melihat penjabaran dari UU tersebut, dapat dilihat adanya pemisahan atau sorotan khusus kepada pemilih yang berusia 17 tahun atau lebih.

Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia antara 17-21 tahun, kecuali mereka yang menikah atau sudah pernah menikah. Pada rentang usia ini mayoritas terdiri dari pelajar SLTA, mahasiswa/I, dan para pekerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara dalam pemilu. Karakteristik perilaku pemilih pemula cenderung masih sangat labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang karena mereka baru terlibat sebagai pemilih dalam kontestasi politik pemilu. Padahal pada usia seperti ini kalangan pemilih pemula termasuk usia paling aktif dan melek dalam bidang informasi dan perkembangan teknologi.

Pemberian ruang partisipasi bagi pemilih pemula dalam pemilu merupakan jawaban terhadap jaminan hak politik seseorang. Dalam sistem pemilu yang demokrasi pilihan politik seseorang diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke: *setiap orang mempunyai hak yang sama pada kebebasan untuk memilih*. Pendapat tersebut pun diperkuat oleh filsuf liberal Inggris yaitu James S Mill, ia percaya bahwa

pemberian suara harus dilakukan dihadapan umum, agar para pemilih dapat bertanggung jawab pada sesama warga Negara atas suara yang mereka berikan, dan karenanya mereka terdorong untuk lebih memikirkan kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas daripada kepentingan-kepentingan pribadi yang lebih sempit<sup>5</sup>.

Pemilih pemula di Kota Serang masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam ajang pemilihan umum karena sebagian besar anak muda yang termasuk dalam pemilih pemula tersebut tidak terlalu peduli dengan pemilu. Dan adapun yang menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum hanya berIndaskan rasa penasaran, selain daripada itu, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya pun belum kearah untuk mendapatkan sosok pemimpin yang betul-brtul berkualitas, tapi oleh karena alasan lain dan tertentu saja. Faktor yang melatar belakang fenomena tersebut adalah karena mereka para pemilih pemula masih belum mendapatkan pendidikan politik yang mencerdaskan perilaku politiknya. Oleh karena itu maka perlu adanya pemberian pemahaman dan sosialisasi kepada para pemilih pemula agar mereka dapat menjadi masyarakat yang sadar politik dan dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat.

---

<sup>5</sup> Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Malang: UB press 2016) hal. 89

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang memiliki anggota yang berorientasi, memiliki cita-cita dan tujuan yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan visinya tersebut. Di Negara demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya dengan sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan penguasa<sup>6</sup>.

Selain daripada itu fungsi dari kehadiran partai politik seharusnya juga dapat memberikan pendidikan politik kepada warga Negara khususnya kepada kalangan para remaja. Namun sejauh ini kehadiran partai politik semenjak pendiriannya di Indonesia dalam hal memberikan pendidikan politik hampir tidak ada. Selama ini program-program yang dilakukan oleh beberapa partai politik cenderung tidak memperhatikan peran dan potensi pemilih dari kalangan ini. Para pemilih pemula tentunya sangat perlu mendapatkan pendidikan politik agar dapat berperan aktif dan berpengaruh pada ranah politik. Mereka sebagai generasi penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hal 405

pengetahuan dalam bidang politik termasuk dalam kegiatan pemilihan umum agar persepsi mereka jangan sampai acuh (golput).

Dalam ranah mengamankan posisi dan potensi pemilih pemula dalam pemilihan umum agar berjalan dengan sesuai dan berintegritas maka posisi pemilih pemula perlu diperhatikan dengan ekstra. Pemilih pemula sebagai warga Negara yang baru mengikuti proses pemilu harus betul-betul mendapatkan pendidikan politik yang efektif dan berkala dari pemerintah terkait. Pada beberapa kesempatan menjelang pemilu, KPU juga nampak terlihat mulai bersentuhan langsung dalam memberikan pendidikan politik bagi para pemilih pemula. Hal ini tentunya diharapkan menjadi suatu siyasat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga Negara.

Komisi Pemilihan umum (KPU) berupaya menjadi parameter yang mampu menjadi agen yang menjamin hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih. Mampu menjamin warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih, dan dapat menggunakan hak pilih mereka. KPU pun turut serta hadir untuk mengefektifkan pemberian pendidikan politik kepada para pemilih pemula. Beberapa kali KPU mengadakan kegiatan sosialisasi

tentang pemilu yang sasaran utamanya adalah pemilih pemula di kalangan pelajar.

Kendati demikian dalam hal mewujudkan hal tersebut tak menutup kemungkinan dalam setiap pelaksanaannya KPU mengalami dan menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Diantaranya adalah perkembangan teknologi yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sumber daya manusianya. Sehingga hal tersebut dapat merubah mindset dan sudut pandang perilaku politik warga Negara.

Menurut pengamatan penulis, pemilih pemula di Kota Serang sejauh ini masih banyak yang tidak mengetahui peran dan tujuannya dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kerena sebagian pemilih pemula belum atau bahkan tidak memiliki modal pengetahuan politik secara substansial. Sebagian pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya pun belum menggunakannya secara baik seperti halnya memilih karena memiliki tujuan memilih berdasarkan analisis paslon secara mendalam. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman-pemahaman dan pendidikan politik yang baik agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

***“PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 (Studi Kasus di Kota Serang)”***

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 dengan fokus studi di wilayah Kota Serang. Yang akan dititik tekankan kepada para pemilih pemula yang berusia 17 sampai 21 tahun, atau mereka yang sudah dan atau pernah menikah.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka selanjutnya penulis selama penelitian merumuskan beberapa masalah agar lebih memudahkan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula di kota Serang dalam PILKADA Provinsi Banten tahun 2017?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kota Serang dalam PILKADA Provinsi Banten tahun 2017?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula di kota Serang dalam PILKADA Provinsi Banten tahun 2017
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kota Serang dalam PILKADA Provinsi Banten tahun 2017

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pada permulaan sampai akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya, dan segenap para pembacanya. Berikut merupakan manfaat sederhana penyusunan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini penulis dapat mengembangkan keilmuan serta wawasan yang dimilikinya untuk bekal meraih cita-cita hidup. Dan bagi para pembaca

agar dapat menambah khasanah keilmuannya khususnya dalam konteks partisipasi politik pemilih pemula dalam pesta demokrasi di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi instansi dan lembaga pemerintah yang menangani dalam bidang perpolitikan dan pemilu, sehingga pemerintah lebih mengutamakan substansi dan kualitas pemilu dari segala sektor.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebagai dasar dan acuan dari teori dan temuan-temuan melalui beberapa hasil penelitian sebelumnya, merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Menurut peneliti, salah satu data pendukung adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari plagiat dan atau kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian ini. Dari beberapa sumber yang peneliti temukan diantaranya sebagai berikut:

1. *“Pengaruh Iklan Pemilu Terhadap Minat Pemilih Pemula (Studi Kuantitatif pada Pemilu Legislatif tahun 2014 pada Iklan TV Versi “Generasi Cerdas” di Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap)”*
2. *“Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 Di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”*

Dalam penelitian terdahulu yang relevan diatas, penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan perihal pokok pembahsan yang penulis akan teliti. Persamaannya adalah, penelitian terdahulu diatas sama-sama menjelaskan tentang pemilih pemula dalam pemilihan umum. akan tetapi terdapat beberapa perbedaan didalamnya khususnya perihal masalah yang akan peneliti bahas lebih menitik fokuskan pembahasan tentang bagaimana partisipasi politik pemilih pemula di Kota Serang dalam konteks pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan juga dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan untuk mengungkap sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula di Kota Serang.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Istilah partisipasi banyak orang yang mengungkapkan tentang peran dan keterlibatan seseorang dalam menuju kedudukan dan posisi strategis yang memiliki fungsi dan pengaruh terhadap kondisi. Suatu penjelasan yang merujuk kepada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan bahwa partisipasi sebagai suatu fungsi dari keterlibatan yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Jika seseorang mempunyai banyak peran dalam hidupnya, maka akan muncul beberapa permasalahan dalam hidupnya. Diantaranya adalah lupa terhadap kedudukan peran utamanya sebagai suatu individu. Karena partisipasi dan keterlibatan seseorang dibutuhkan sebagai aktualisasi diri untuk menunjukkan eksistensinya terhadap diri orang lain. Partisipasi yang memenuhi akan sebuah kebutuhan yang sesuai dan ideal akan menghasilkan harga diri yang tinggi, namun begitupun sebaliknya. Apabila partisipasi tersebut tidak sesuai dan ideal, maka akan menghasilkan harga diri dan eksistensi yang rendah.

Remaja atau kaum muda merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari tatanan sosial dan politik dalam suatu Negara

demokrasi. Karena remaja memiliki makna dan potensi untuk terus tumbuh dan berkembang sampai menemukan kematangan berfikir dan berperilaku. Definisi remaja bisa dikatakan sebagai perubahan perilaku dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Karena status remaja ini berada dalam masa transisi perubahan perilaku dan perkembangan pemikiran, maka perlu adanya perhatian khusus yang diberikan kepada mereka baik dari lingkungan terdekat yaitu keluarga maupun pemerintah<sup>7</sup>.

Pemilih pemua adalah mereka para pemilih yang baru akan pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk diberikan kepada pemilih pemula terutama bagi mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara. KPU dengan dibantu oleh pihak lainnya harus mampu memberikan kesan awal yang baik tentang pentingnya menggunakan dan memberikan hak suara mereka dalam pemilu. Pemahaman yang diberikan adalah setiap suara yang mereka berikan sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan bangsa kedepan yang dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pemahaman yang baik itu diharapkan

---

<sup>7</sup> M. Ali dan M. Asrori, *Psikologi Remaja: perkembangan peserta didik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2005) hal. 9

mampu menjadi motivasi terus menerus untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting terhadap kemajuan kualitas suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan akan semakin menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial, politik dan lainnya. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Pendidikan pun sangat berpengaruh dalam perubahan arah pandang dan penilaian terhadap sesuatu secara subyektif dan obyektifnya. Adanya pendidikan yang memadai diharapkan dapat mengentaskan segala perilaku menyimpang dan perilaku acuh terhadap hal yang selayaknya terjadi. Perilaku politik masyarakat dalam kegiatan politik pun sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikannya.

Semakin banyak pendidikan yang dikonsumsi oleh para remaja akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku mereka. Dalam konteks pendidikan politik pun remaja seharusnya sudah mendapatkan asupan nutrisi pendidikan politik agar perilaku

dan partisipasi mereka bisa mengakibatkan dampak positif pada kemajuan bangsa dan Negara.

Selain daripada tugas pemerintah, KPU dan KPUD pun memiliki tugas urgent dalam membangun kesadaran politik pemilih pemula. Salah satu tugas KPUD adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula agar mereka paham dan kenal betul dengan politik dan mengerti tentang pentingnya peran mereka agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. Harapan yang didambakan tentunya agar para pemilih pemula ini menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya<sup>8</sup>.

Dalam konteks politik modern partisipasi politik merupakan suatu fenomena yang cenderung menjadi masalah dan dijadikan sebagai titik fokus kajian politik bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Partisipasi politik ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal kebijakan umum. Secara umum dapat dikatakan pula

---

<sup>8</sup> Muchtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, ....*, hal. 92

perilaku masyarakat yang ikut berperan aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin Negara dan sebagainya<sup>9</sup>.

Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi merupakan bagian yang sangat penting. Karena segala sesuatu yang diperbuat oleh pemerintah yang dapat mengakibatkan dampak bagi hajat hidup orang banyak akan sangat berpengaruh dan berdampak luas. Oleh karena itulah keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik perlu dilakukan agar segala sesuatu yang diperbuat oleh pemerintah bisa melibatkan masyarakat umum dalam prosesnya.

Partisipasi politik masyarakat tidak serta merta muncul begitu saja. Tentu ada pemantik atau hal yang menyebabkan seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik diantaranya yaitu karena faktor pendidikan maupun keadaan sosial dan ekonominya. Tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap partisipasi seseorang karena dengan pendidikan cara pandang seseorang akan lebih maju dan cenderung analaisis. Dan juga status sosial ekonomi menjadi faktor penunjang untuk mengakses informasi dengan mudah. Dengan

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,..., hal. 367

adanya fasilitas yang memadai, segala bentuk informasi tentang banyak hal akan dengan mudah terserap<sup>10</sup>.

Dalam ranah pemilihan umum, dimana melibatkan seluruh aspek masyarakat dalam pelaksanaannya dan tidak hanya melibatkan orang tua saja tetapi melibatkan pula para remaja yang sudah termasuk dalam kategori pemilih. Diharapkan mampu menjadi sarana memaksimalkan kinerja masyarakat dan pemerintah dalam konteks Negara demokrasi. Dan untuk menghadirkan pemilih pemula yang cerdas dalam partisipasi politik tentu bukanlah hal mudah. Karena itu peran KPU dalam memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi pemilih pemula sangatlah penting. Sekalipun sudah ada program untuk meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula, saya rasa perlu adanya peningkatan sosialisasi dan cara lain yang lebih efektif dalam memberikan pendidikan politik bagi para pemilih pemula. Agar cita-cita untuk menjadikan pemilih pemula yang cerdas dapat sama-sama kita rasakan dalam kontes pemilihan umum kedepan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>10</sup> Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008) hal, 61

Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis, faktual dan akurat, serta menunjukkan data otentik berdasarkan hasil kajian dan pengamatan. Jenis penelitian ini terlihat ingin digambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah secara holistic teori. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan metode pengumpulan data dan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

Penelitian ini akan difokuskan dan ditujukan pada para pemilih pemula dan KPU Kota Serang dalam pelaksanaan Pilkada provinsi Banten tahun 2017.

## 2. Wilayah penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan sebelumnya diatas. Maka peneliti menentukan dan memilih lokasi untuk melakukan penelitian di wilayah kota Serang Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan dan hal yang paling mendasar adalah agar penelitian ini lebih terfokus.

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.175

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena dan gejala-gejala dengan menggunakan pencatatan sistematis. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha disengaja untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasi. Observasi ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terdiri dari orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak didapatkan lewat pengamatan.<sup>12</sup>

Wawancara atau interview ini dilakukan langsung terhadap pihak KPU Kota Serang dan para pemilih pemula di wilayah kota Serang. Dalam prosesi wawancara ini diharapkan penelitian penggalan data akan lebih mudah. Peneliti akan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan tapi tetap membiarkan kedinamisan wawancara guna menambah pengetahuan dan informasi yang peneliti butuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk menambah data dalam penelitian yang dilakukan. Data yang akan menjadi bahan dokumentasi dalam penelitian ini berupa data demografi dan monografi, surat kabar, foto, dan semua hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam

---

<sup>12</sup> Burhan Ashoshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rinaka Cipt, 2007), h.59

penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini oleh penulis dibagi kedalam 5 (lima) Bab dan dalam setiap bab dikategorikan kedalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang kondisi obyektif lokasi penelitian meliputi: sejarah Kota Serang, Kondisi geografis dan luas wilayah Kota Serang, kondisi social masyarakat Kota Serang, profil KPU Kota Serang, dan Pemilih pemula di Kota Serang.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tinjauan tentang partisipasi politik pemilih pemula di Kota Serang dalam PILKADA Provinsi Banten tahun 2017 yang meliputi: sejarah pemilu, pengertian

pemilu, sistem pemilu di Indonesia, teori partisipasi politik, dan teori pemilih pemula.

Bab keempat merupakan bab yang membahas analisa terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam PILKADA Provinsi Banten tahun 2017 yang meliputi: tingkat partisipasi pemilih pemula, dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kota Serang dalam PILKADA Provinsi Banten tahun 2017.

Bab kelima berisikan tentang kesimpulan yang di dasarkan pada analisis dan pembahasan yang di lakukan. Kesimpulan ini mengacu pada tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui dan memberikan gambaran perihal hasil akhir dari penelitian ini. dan saran-saran.